

KOLABORASI UNTUK BUMI

Perjalanan CSF/YSKI untuk Sintang Lestari
2018-2024



Daftar Isi



TENTANG SINTANG



Sekilas Sintang
Pemimpin, Peluang dan Tantangan

CSF/YSKI di SINTANG



Penguatan Fondasi
Penguatan Komitmen dan Kapasitas Lokal
Penguatan Sektor Prioritas
Penguatan Kolaborasi

REFLEKSI AKHIR



Kolaborasi dan Perubahan Mindset:
Kunci Menuju Sintang Lestari

TENTANG SINTANG



Sekilas Sintang



Pemimpin, Peluang dan Tantangan





SEKILAS SINTANG

Luas 21.638 km2.

Jumlah penduduk: 438.022 (BPS Kabupaten Sintang, 2024).

Kepadatan penduduk 20,20 jiwa/km2 yang terdiri dari multi etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu.

Kabupaten Sintang memiliki sekitar 1,3 juta hektar kawasan hutan atau sama dengan 1,35 % dari keseluruhan luas hutan Indonesia (BPS, 2022). Hutan Sintang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk yang terdapat di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Pembagian fungsi kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Lindung (HL).

Kawasan hutan lindung dan hutan produksi mencakup 59% dari luas wilayah Kabupaten Sintang. Kawasan hutan yang ada selain menjadi penyerap karbon dan sumber oksigen juga menyediakan lahan bagi masyarakat Sintang



Litografi Sintang berdasarkan lukisan Josias Cornelis Rappard (1883-1889)

untuk bertani dan memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pangan, obat-obatan, air bersih, hingga kebutuhan papan.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak Sungai Kapuas, dan Sungai Kayan yang merupakan anak Sungai Melawi.

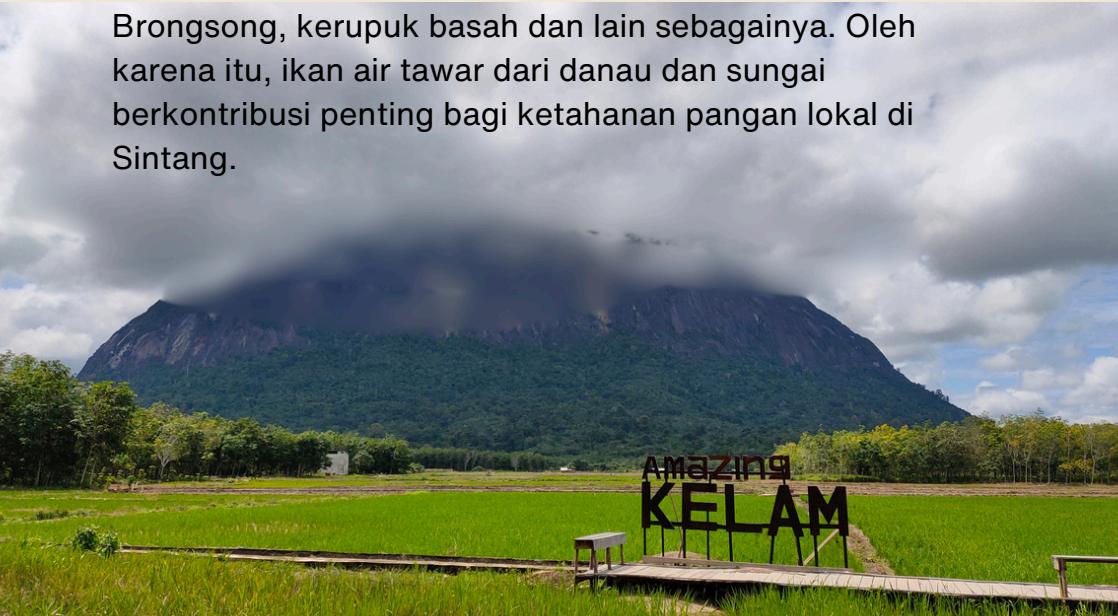
Sistem Hidrologi Kabupaten Sintang dibagi menjadi 8 Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain sungai, Kabupaten Sintang memiliki puluhan danau yang 10 di antaranya sudah ditetapkan sebagai danau lindung. Sungai dan danau di Sintang selain berfungsi sebagai jalur

transportasi, juga sebagai habitat keanekaragaman hayati. Beberapa sungai di Kabupaten Sintang juga memiliki fungsi penting sebagai sumber ketersediaan air sebagai penunjang kegiatan masyarakat meskipun sumber air tersebut bukan pada status layak konsumsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, 2023).

Selain sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati, sungai dan danau di Kabupaten Sintang memiliki potensi produksi perikanan perairan darat sebagai salah satu sumber protein penting untuk masyarakat setempat. Semua kampung dan kota terletak di tepi sungai. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein utama. Sungai-sungai dan danau-danau di Sintang menjadi habitat bagi banyak ragam ikan konsumsi air tawar seperti ikan lais, ikan baung, ikan toman, ikan gabus, dan ikan patin yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan protein masyarakat melalui perikanan tangkap tradisional dan budidaya.

Beberapa jenis ikan konsumsi penting yang ditengarai sudah langka di Kabupaten Sintang adalah ikan tapah, ikan semah dan ikan jelawat. Gambar ikan jelawat sebagai representasi ikan air tawar penting menjadi bagian dari emblem resmi Kabupaten Sintang.

Ikan hias Arwana yang dulu dibanggakan pusat produksinya berada di Sintang, sekarang hampir tidak pernah terdengar. Beberapa makanan khas asal Sintang juga terbuat dari ikan misalnya Ikan Lais Salai, dan Ikan Brongsong, kerupuk basah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikan air tawar dari danau dan sungai berkontribusi penting bagi ketahanan pangan lokal di Sintang.



Satu jam dari Kota Sintang tepatnya di Kecamatan Kelam Permai terdapat Bukit Kelam, yang merupakan salah satu batu monolit tertinggi di dunia dengan tinggi 1.002 meter menonjol dari dataran sekitarnya.

Bukit Kelam lebih tinggi daripada Uluru yang lebih terkenal dengan nama Ayers Rock, batu monolit terbesar di Australia, yang tingginya 348 meter dibanding wilayah sekitarnya.

Selain menjadi potensi pariwisata, di Bukit Kelam juga terdapat kekayaan tumbuhan langka, di antaranya kantong semar atau *nepenthes clipeata*. Saat ini populasi kantong semar di Bukit Kelam hanya tersisa 13 rumpun, yang semuanya jantan, sehingga menjadi tantangan untuk pengembangbiakan dan kelestariannya. Selain kantong semar, di Bukit Kelam juga terdapat tumbuhan Anggrek hitam. Sedangkan untuk fauna, dilaporkan masih terdapat beruang madu, trenggiling dan burung walet pada gua-gua di kawasan Bukit Kelam.



Kota Sintang sebagai Ibukota Kabupaten Sintang terletak pada pertemuan atau muara Sungai Melawi yang bergabung dengan Sungai Kapuas. Dalam sejarahnya kata Sintang disebut berasal dari kata Senentang yang berarti 'lokasi setentang' pertemuan kedua sungai tersebut. Di masa lalu, Senentang adalah pusat kerajaan yang kratonnya masih berdiri tegak sampai sekarang di seberang pertemuan masuknya Sungai Melawi ke Sungai Kapuas.



Masyarakat Sintang yang berasal dari Suku Dayak dan Melayu memiliki hubungan erat dan harmonis dengan alam, dan memegang teguh prinsip menghormati alam yang menjadi bagian nilai adat secara turun temurun.

Suku Dayak memiliki filosofi hidup **HAMPARAN HATI** yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Filosofi ini diwujudkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap hak-hak alam.

Bagi suku Dayak, manusia dan alam adalah dua entitas yang saling bergantung, di mana manusia dianggap sebagai bagian dari alam, bukan pemilik atau pengendali mutlaknya. Keyakinan ini mendorong mereka untuk menjaga kelestarian alam agar tetap dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain hubungan harmonis dengan alam, filosofi "Hampanan Hati" juga menekankan pentingnya nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Suku Dayak percaya bahwa upaya melestarikan lingkungan hanya dapat berhasil melalui kerjasama yang kuat di dalam masyarakat serta perlakuan adil terhadap semua makhluk hidup. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup

mereka, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat diwariskan kepada generasi mendatang dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Budaya Suku Dayak seperti tradisi **GAWAI DAYAK**, upacara yang dilakukan secara besar-besaran setelah panen padi, merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada alam serta wujud upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, atau ritual **UMPAN BENUA** yang mengandung pesan untuk menjaga kelestarian alam dan sebagai pengingat agar manusia tidak merusak alam. Selain itu, Umpan Benua juga dikenal sebagai "sedekah bumi," dengan filosofi mengucap syukur atas karunia Tuhan serta komitmen untuk menjaga lingkungan.

Suku Dayak juga dikenal memiliki tradisi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan cara membuka lahan pertanian baru secara gilir-balik atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya secara berkala dalam satu lingkaran tempat dan waktu yang sistematis. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar hutan tetap lestari, hara dalam tanah terbarukan, dan tetap dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Penebangan dan pembakaran hutan dilakukan secara selektif dan ketat, dan hanya menebang pohon yang memang dibutuhkan.

Setelah lahan pertanian diolah selama beberapa tahun, maka akan ditinggalkan dan pindah ke lahan baru atau lahan yang sudah pernah digunakan sebelumnya, diolah kembali dalam siklus waktu yang teratur.

Suku Dayak juga selalu melakukan penanaman kembali untuk memastikan kelestarian hutan dan menghormati hak-hak alam. Mereka menanam berbagai jenis pohon yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem hutan.





PEMIMPIN, PELUANG DAN TANTANGAN

Setelah terpilih sebagai Bupati Kabupaten Sintang di tahun 2016, dr. Djarot Winarno MPH, mendeklarasikan niatnya untuk menjadikan Kabupaten Sintang sebagai Kabupaten Sintang Lestari.

Deklarasi ini didasarkan pada kegusarannya akan tren perkembangan pemanfaatan lahan oleh berbagai pihak secara luas namun kehidupan masyarakat asli Sintang berkembang lamban. Deklarasi ini diikuti dengan banyak langkah konkrit sebagai pemimpin wilayah yang serius untuk mendorong perubahan-perubahan yang diperlukan terkait dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan, dan perencanaan pembangunan.

Pak Bupati secara pro-aktif mendorong berbagai proses multi-pihak dan pengembangan kapasitas aparatur sipil Kabupaten Sintang untuk penguatan proses-proses perubahan yang diperlukan. Pak Bupati juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak, termasuk donor, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan investor yang berorientasi keberlanjutan untuk datang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan para pihak di Sintang.

Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu kabupaten yang ikut mendirikan Perkumpulan LTKL (Lingkar Temu Kabupaten Lestari).



Perkumpulan yang beranggotakan sembilan pemerintah kabupaten ini dibentuk dan dikelola dengan tujuan mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan/lestari yang mensejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup melalui berbagai kemitraan. LTKL yang berdiri sejak bulan Juli 2017 merupakan kaukus pembangunan lestari di dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Secara umum, LTKL sebagai sebuah platform kerjasama terdiri dari dua bagian, yaitu kelompok anggota pemerintah kabupaten-kabupaten yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, dan kelompok mitra pendukung yang terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan investor pro-keberlanjutan (*impact investment facilities/companies*) yang tertarik melakukan investasi usaha berkelanjutan di kabupaten-kabupaten anggota LTKL. CSF Indonesia/YSKI adalah salah satu anggota kelompok mitra pembangunan di LTKL.

PEREKONOMIAN SINTANG didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sintang, sebesar 23,59% pada tahun 2023 (sumber BPS, Kabupaten Sintang, 2023). Angka tersebut memperlihatkan trend pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2019, dimana sektor tersebut berkontribusi sebesar 21,7%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sintang tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Peralihan fungsi lahan yang terjadi justru meningkat. Dari hasil studi terkait kondisi perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan (*Land Use and Land Cover Change - LULC*) menunjukkan bahwa terjadi perubahan lahan selama periode 2006 hingga 2016.

Seluas 87.680 ha hutan sekunder telah beralih fungsi, diikuti semak belukar seluas 12.874 ha, dan hutan primer seluas 7.289 ha.

Sedangkan peningkatan terbesar pada periode yang sama terjadi pada perkebunan (87.539 ha), lahan terbuka (16.159 ha), dan pertanian lahan kering (8.589 ha).

Analisis lebih lanjut tentang hilangnya hutan sekunder menunjukkan bahwa sebagian besar hutan sekunder diubah menjadi perkebunan (35%), diikuti oleh semak (32%) dan pertanian lahan kering (29%). Total perubahan luas wilayah hutan Kabupaten Sintang dari tahun 2006 sampai 2016 seluas 226.311 ha atau 10% dari luas wilayah Kabupaten (Sumber: Studi Sintang Growth Diagnostics, CSF/YSKI).

TINGKAT KEMISKINAN di Kabupaten Sintang mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada saat CSF/YSKI melakukan studi latar belakang pada tahun 2018, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang sempat mengalami kenaikan dari 8,56% pada tahun 2012 menjadi 10,2% pada tahun 2017.

Data terbaru menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,03% atau sejumlah 670.853 orang pada tahun 2024.

Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 6,32% pada tahun 2024.

KESETARAAN GENDER juga masih menjadi isu di dalam kesempatan bekerja di setiap sektor. Tenaga kerja perempuan lebih banyak bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, diikuti oleh sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan usaha perorangan. Sebaliknya, kesempatan bekerja bagi kaum laki-laki lebih merata di setiap sektor.

Tingginya ketergantungan kelompok perempuan terhadap sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan juga berarti bahwa kelompok ini memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena mayoritas mereka yang bekerja di sektor ini bekerja dengan status informal atau tidak memiliki jaminan sosial, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Salah satu hasil temuan studi yang dilakukan tim CSF/YSKI juga menunjukkan bahwa efisiensi penambahan investasi yang dilakukan di Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata di level provinsi.

Kabupaten Sintang memiliki nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) positif dari tahun 2011 hingga 2019. Pada tahun 2019, nilai ICOR Kabupaten Sintang adalah 4, sedangkan Kalimantan Barat pada periode yang sama, nilai ICORnya 3,8.

Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan output di Kabupaten Sintang, dibutuhkan lebih banyak investasi dibandingkan rata-rata di level provinsi (Sintang Growth Diagnostics Report, 2021). Ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan strategi investasi di Sintang, melalui Naskah Akademik Penyusunan RUPM Kabupaten Sintang yang juga didukung oleh CSF/YSKI.



Scan QR code
untuk laporan
lengkap



Dengan tantangan yang ada, Pemerintah Kab Sintang sepakat bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

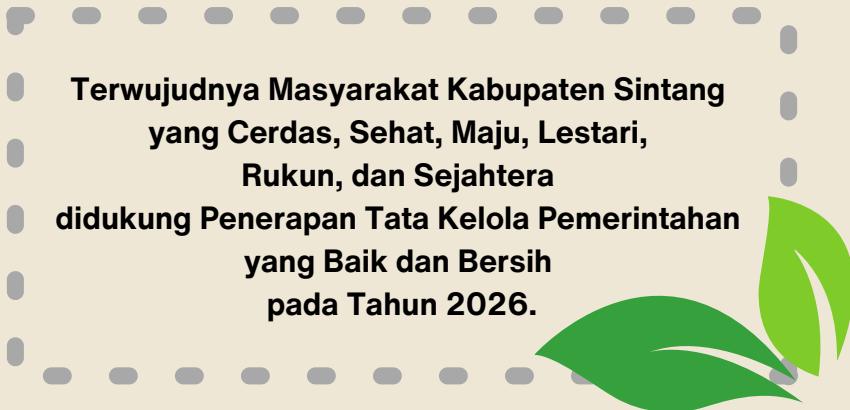
Sebagian besar masyarakat Sintang menggantungkan hidup pada kekayaan alam untuk kebutuhan sehari-hari. Korporasi yang melakukan investasi di Kabupaten Sintang juga bergantung pada pemanfaatan lahan. Ketergantungan ini secara perlahan menyebabkan kerusakan lingkungan, karena aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang intensif tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Dengan segala potensi sumber daya alam Kabupaten Sintang dan keterikatan kesejahteraan penduduknya dengan pemanfaatan kekayaan alam, maka untuk mencapai TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di Kabupaten Sintang diperlukan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan agar lingkungan tetap terjaga dengan meminimalisir kerusakan sumber daya ekonomi. Diperlukan perencanaan terpadu, yang menggabungkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perencanaan penggunaan lanskap dan tata ruang yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis, serta perencanaan investasi yang mendukung

keberlanjutan jangka panjang. Sinergi antara berbagai aspek ini diharapkan dapat meningkatkan laju pembangunan di Kabupaten Sintang tanpa mengorbankan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengakomodir aspek keberlanjutan sumber daya dan lingkungan hidup dalam kebijakan, rencana dan program pemerintah, terlihat dalam penyesuaian terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang 2021-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Sintang disesuaikan menjadi



**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang
yang Cerdas, Sehat, Maju, Lestari,
Rukun, dan Sejahtera
didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Bersih
pada Tahun 2026.**

Penambahan kata “lestari” dalam visi tersebut dimaksudkan bahwa Kabupaten Sintang harus maju, berkembang, berubah ke arah yang lebih baik tetapi harus tetap lestari. Lestari merupakan kata populer bahasa

Indonesia yang mewakili seluruh komponen keberlanjutan dalam hal pembangunan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang ini dibuktikan dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) yang kemudian diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Perjalanan menuju Sintang Lestari tidaklah mudah dan penuh tantangan. Di antara tantangan itu adalah tingginya angka kemiskinan, rendahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, serta infrastruktur yang belum memadai.



Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, sementara kerusakan lingkungan, seperti banjir dan polusi akibat kebakaran hutan dan lahan, masih menjadi persoalan serius.



Secara keseluruhan, tantangan ini mempengaruhi potensi penguatan ekonomi lokal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan berbagai macam intervensi, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya pengembangan ekonomi kreatif, dan membuat berbagai kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan kebijakan dan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sintang berkolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan dalam melakukan berbagai intervensi kebijakan, termasuk melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten, kondisi geografis,

karakteristik wilayah, karakter dan perilaku penduduk.

Salah satu mitra kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Conservation Strategy Fund (CSF Indonesia) atau Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (YSKI) yang terlibat dalam berbagai program penguatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan, yang dilakukan seiring dengan program peningkatan kapasitas terkait dengan perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam proses transisi menuju Kabupaten Sintang Lestari.

CSF INDONESIA/ YSKI DI SINTANG



Penguatan Fondasi



Penguatan Komitmen
dan Kapasitas Lokal



Penguatan Sektor Prioritas



Penguatan Kolaborasi



Sejak bulan April 2018, CSF/YSKI telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memfasilitasi transisi menuju Kabupaten Sintang Lestari pada tahun 2030.

Kehadiran CSF/YSKI di Sintang didasarkan pada undangan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada organisasi mitra di dalam LTKL untuk mendukung penguatan perencanaan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan kesesuaian dengan bidang keahlian utama CSF/YSKI yaitu dalam bidang ekonomi pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam.

Selama 6 tahun, CSF/YSKI berperan aktif dalam mendukung penguatan visi Sintang Lestari, perumusan RPJMD, perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai strategi pengembangan investasi , serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. CSF/YSKI juga menginisiasi penguatan sektor-sektor ekonomi strategis yang terkait dengan kehidupan masyarakat Sintang secara luas. Seiring dengan pengembangan berbagai aspek perencanaan dan kebijakan untuk Sintang Lestari, CSF/YSKI melakukan pengembangan kapasitas tenaga fungsional perencana dan program untuk OPD-OPD terkait, khususnya di BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dinas Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

CSF/YSKI selalu melibatkan pegiat organisasi masyarakat sipil Sintang, para pendukung transisi menuju Sintang Lestari, di dalam semua kegiatan pengembangan kapasitas di Sintang. Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, pendampingan proses perencanaan, dan studi kebijakan oleh tim gabungan staf fungsional OPD dan CSO Sintang.

Selama masa baktinya di Kabupaten Sintang, CSF/YSKI berhasil memfasilitasi lahirnya beberapa kebijakan penting. Salah satu yang menonjol adalah Peraturan Bupati Nomor 66/2019 yang menetapkan Rencana Aksi Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan (RAD - Sintang Lestari), yang telah diintegrasikan ke dalam RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2/2021. Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 37/2022 mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal untuk periode 2022-2025, yang menjadi dasar dan panduan bagi promosi investasi berkelanjutan di Kabupaten Sintang.

Proses revisi RTRW masih berlangsung ketika tulisan ini dibuat. Pengembangan perikanan darat menuju perumusan sistem tata kelola berkelanjutan baru mencapai penyelesaian studi awal sebagai basis bagi dialog para

pihak untuk langkah berikutnya.

Dalam periode yang sama CSF/YSKI telah menyelenggarakan 10 pelatihan yang mencakup berbagai topik keilmuan dan keterampilan terkait perencanaan pembangunan dan tata ruang, dan 7 penelitian bersama yang melibatkan staf OPD terkait.

Perjalanan CSF/YSKI bersama para pihak pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Sintang dimulai dengan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Sintang, LTKL, dan CSF/YSKI yang memberikan mandat bagi YSKI untuk memfasilitasi penguatan visi inisiatif Sintang Lestari dan menurunkan konsekuensinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perjalanan bersama dalam kurun waktu enam tahun ini dapat dibagi menjadi 3 fase: (i) Fase Penguatan Fondasi; (ii) Fase Penguatan Komitmen dan Kapasitas; (iii) Fase Penguatan Sektor Prioritas/Strategis.

Setiap fase memiliki cakupan program dan perkembangan dinamika para pihak pemangku kepentingan yang berbeda secara progresif dalam hal membangun dukungan dan partisipasi yang lebih luas, baik dari para pihak di dalam maupun yang berada di luar Kabupaten Sintang.

Tentang CSF/YSKI

Conservation Strategy Fund (CSF) didirikan pada tahun 1998 di California, USA, dengan keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dicapai tanpa mengorbankan lingkungan hidup. Sekarang, CSF berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat, dan bekerja di beberapa negara di Amerika Selatan dan Afrika. Misi CSF adalah mempromosikan penggunaan prinsip-prinsip ekonomi dan tata kelola yang baik dalam kebijakan publik dan sistem manajemen sumber daya ekosistem alami.

CSF Indonesia didirikan pada Maret 2016 dan terdaftar secara resmi sebagai Yayasan Strategi Konservasi Indonesia.

CSF meyakini bahwa kebijakan publik akan lebih efektif jika didukung oleh instrumen ekonomi dan tata kelola yang baik, serta dirancang dengan pendekatan sistemik. Untuk mencapai tujuan tersebut, CSF Indonesia melakukan berbagai kegiatan guna membangun kapasitas pemangku kepentingan di Indonesia, baik dari pihak pemerintah daerah, akademisi maupun pihak-pihak terkait lain.

Kegiatan peningkatan kapasitas CSF/YSKI tidak hanya pelatihan tapi juga berupa fellowship/beasiswa

penelitian dan pendampingan langsung pengembangan perencanaan dan kebijakan. Semua dilakukan sebagai cara untuk memperkuat hubungan antara sains, konteks sosial-ekonomi masyarakat, dan kebijakan, baik di laut maupun darat.

Pelatihan CSF/YSKI mentargetkan peserta dari komunitas pendorong perubahan (community of change makers) di dalam dan di luar lembaga pemerintah. Karena itu pelatihan-pelatihan CSF/YSKI diikuti oleh staf fungsional perencana dari OPD, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

Penerima beasiswa CSF/YSKI terdiri dari dua kategori peneliti, yaitu melalui program kompetisi nasional, dan kompetisi provinsi untuk mendapatkan beasiswa penelitian yang dialokasikan untuk provinsi tersebut.

Peneliti di tingkat provinsi diwajibkan membuat tim peneliti yang terdiri dari akademisi, dinas terkait, Bappeda, dan aktivis CSO atau staf asosiasi usaha. CSF/YSKI menyediakan mentor yang berdedikasi untuk setiap beasiswa penelitian yang diberikan. Peneliti wajib melakukan diseminasi hasil risetnya di lokasi yang dekat dengan pihak terkait sesuai tema penelitiannya. Penguatan kapasitas melalui pendampingan langsung biasanya dilakukan dalam bentuk tim studi atau tim kerja atau tim fasilitasi gabungan yang terdiri dari staf fungsional OPD, akademisi lokal, dan staf YSKI.



PENGUATAN FONDASI

Yang dilakukan pada FASE PENGUATAN FONDASI:

- Studi Latar Belakang
- Dialog Para Pihak
- Perencanaan Skenario menuju Sintang Lestari 2030
- Pelatihan dan Lokakarya Pemodelan Lanskap Berkelanjutan
- Wawancara mendalam bersama para pimpinan OPD Kabupaten Sintang
- Perumusan Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari 2030 melalui PerBup No. 66/2019.

Di Indonesia, seperti di banyak bagian dunia lainnya, pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta perubahan iklim semuanya memberikan tekanan besar terhadap sumber daya lahan. Tekanan ini semakin diperparah oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pembangunan infrastruktur yang dianggap sebagai jalan cepat menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perkebunan kelapa sawit di Sintang mencapai 195.780 ha (sumber: BPS Sintang 2022), dan permintaan untuk membuka perkebunan skala besar baru terus meningkat. Di saat yang sama, komunitas lokal juga terdorong untuk membuka perkebunan kelapa sawit mandiri sebagai jalur yang dianggap cepat menuju kemakmuran.

Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai anggota kabupaten LTKL menyadari pentingnya kebutuhan pengetahuan untuk perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Sejak dimulai proses transisi perencanaan menuju Sintang Lestari, Bupati Sintang telah mengumumkan akan membatasi dan mengurangi luas target perkebunan kelapa sawit yang semula direncanakan di Sintang. CSF/YSKI sebagai mitra pembangunan kabupaten anggota LTKL berfokus membantu Kabupaten Sintang mewujudkan

tercapainya Pembangunan Berkelanjutan dengan inisiatif Sintang Lestari.

Cita-cita bersama dari kemitraan ini untuk mendukung transisi pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi melalui pendekatan yurisdiksi. Dengan keahlian utama di bidang ilmu ekonomi, perencanaan pembangunan berkelanjutan, serta fasilitasi perencanaan strategis, CSF/YSKI mendukung proses transisi ini dengan dukungan pendanaan dari Packard Foundation.



Dialog dan Studi Latar Belakang

CSF memulai dengan mengadakan **Stakeholders Dialogue** yang melibatkan multi pihak dalam pembuatan kebijakan untuk menggali berbagai aspirasi, harapan, keresahan hingga tantangan yang dihadapi terkait inisiatif Sintang Lestari. Sesi dialog diadakan selama dua hari, 8-9 Mei 2018, diikuti 80 peserta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga masyarakat adat, pelaku usaha, NGO/CSO dan berbagai pihak yang berkepentingan di Sintang.

Tujuan dari dialog ini adalah untuk:

- ➔ memperkenalkan pemikiran yang ada di Pemerintah Kabupaten terkait gagasan Sintang Lestari;
- ➔ mendengar aspirasi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan mengenai konsep Sintang Lestari;
- ➔ memetakan program/inisiatif yang sedang berjalan dari masing-masing pemangku kepentingan; dan
- ➔ mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk studi latar belakang serta menjadi dasar atau bahan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Berbagai aspirasi dari hasil dialog tersebut ditampung menjadi kumpulan isu dan bahan informasi untuk melakukan **Studi Latar Belakang**.

Studi latar belakang dilakukan selama 2 (dua) bulan dari Mei – Juni 2018. Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi guna memotret kondisi terkini dan tren atau kecenderungan yang sedang terjadi di Kabupaten Sintang dalam empat aspek utama.

Keempat aspek utama tersebut adalah: 1) sejarah, budaya dan adat istiadat masyarakat Sintang, 2) pembangunan ekonomi, 3) sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan 4) tata kelola lahan dan reforma agraria.

Para ahli yang berasal dari Universitas Kapuas di Kota Sintang menjadi pelaksana dalam penelitian studi latar belakang ini. Tim Ahli ini terdiri dari Victor Emanuel untuk topik sejarah, dan budaya masyarakat Sintang, Stefanus Masiun untuk topik pembangunan ekonomi, Hendra Setiawan untuk topik SDA dan lingkungan hidup, dan Michelle Eko Hardian untuk topik ekonomi berbasis lahan, tata kelola lahan dan reforma agraria. Hasil dari studi latar belakang ini digunakan sebagai dasar perencanaan skenario Sintang Lestari 2030.

Menyadari adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas para pihak sebelum mulai melakukan Perencanaan Skenario, CSF/YSKI menggelar pelatihan dan lokakarya, yang mencakup topik Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Lanskap Terpadu dan Perencanaan Skenario.

Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Skenario

Program pelatihan pembangunan berkelanjutan dan kebijakan lanskap terpadu dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari 30 Juli – 2 Agustus 2018. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dengan berbagai latar belakang dan institusi, baik dari kalangan pemerintah, lembaga masyarakat adat, NGO/CSO, dan stakeholder lainnya yang ada di Sintang. Program pelatihan ini dimaksudkan sebagai ruang belajar bersama para pihak untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan SDA, khususnya hutan, lahan dan lingkungan yang lebih baik dalam koridor pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan tiga pilar: ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selama pelatihan, peserta menggali realitas lapangan secara menyeluruh dan terintegrasi, memetakan situasi masalah dan menentukan akar masalah. Dengan demikian, para peserta pelatihan diharapkan mampu menentukan pendekatan dan instrumen, termasuk instrumen ekonomi, untuk menyelesaikan akar masalah dimaksud. Hasil pelatihan diharapkan dapat dituangkan ke dalam usulan kebijakan terkait praktik pengelolaan SDA dan lingkungan dengan pendekatan lanskap terintegrasi dalam konteks Kabupaten Sintang.

Secara khusus pelatihan ini bertujuan, antara lain untuk:

- menguatkan pemahaman tentang konsep pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan empat pilar: sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola dalam konteks pembangunan Kabupaten Sintang,
- memahami kembali fungsi dan peran masing-masing institusi di dalam lanskap Kabupaten Sintang,
- membangun pandangan terkait tantangan pengelolaan sumberdaya hutan, perairan dan lahan yang terintegrasi dalam bingkai ekonomi dan struktur insentif yang mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan para pihak.

Pelatihan pembangunan berkelanjutan dan kebijakan lanskap terpadu mampu mengubah pola pikir berbagai institusi dalam memahami keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Proses pemahaman yang memerlukan waktu dilakukan dengan persuasi berbagai pihak melalui data, studi dan pemetaan realistik yang disampaikan dengan menarik menggunakan analogi sederhana. Dengan demikian pemahaman itu berangsur dapat diterima dengan baik. Terutama bagi para perencana di OPD yang sebelumnya hanya memahami faktor lingkungan yang harus dijaga namun belum mampu menerjemahkan pada program kelestarian, dan memperhitungkan aspek ekonomi dalam kebijakan yang dibuat.

Dalam proses ini, CSF/YSKI membekali para pihak untuk berdiskusi dan menuangkan mimpi dan harapannya dalam Perencanaan Skenario untuk menerjemahkan konsep Sintang Lestari ke dalam tataran pelaksanaan yang lebih realistik.

Lokakarya Perencanaan Skenario menghasilkan antara lain (a) Fokus Kepedulian yang menjadi harapan dan kekuatiran para pihak di tahun 2030 sebagai waktu di masa depan yang dapat dibayangkan, (b) Faktor-faktor dan Aktor-aktor Pendorong atau penentu bentuk masa depan yang mungkin terjadi, (c) Skenario atau gambaran masa depan yang mungkin terjadi sebagai hasil dinamika interaksi antar faktor dan aktor pendorong; (d) Visi Sintang 2030 yang merupakan skenario terbaik yang dipilih oleh para pihak untuk diwujudkan, (e) Tantangan dan Implikasi dalam mewujudkan visi; dan (f) Peta Jalan menuju Sintang Lestari.

Dengan proses yang berbasis partisipasi pemangku kepentingan, tujuan dari rangkaian proses Perencanaan Skenario Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk

-  mengembangkan pemahaman antara para pemangku kepentingan tentang masa depan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sintang,
-  menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara sistematis dalam proses

perencanaan pembangunan berkelanjutan sejak awal sampai dengan pemantauan pelaksanaan,

- merumuskan bersama visi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sintang Lestari,
- merumuskan dan menyepakati/merekomendasikan langkah-langkah perubahan kunci dan peta jalan untuk menuju visi bersama yang ingin dicapai,
- menyepakati langkah-langkah dan proses adopsi hasil Perencanaan Scenario ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pemerintah termasuk, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Perencanaan skenario dilakukan melalui proses multipihak dari 1 – 5 Oktober 2018, diikuti sekitar 60 peserta perwakilan dari lintas lembaga/pemangku kepentingan. Kegiatan didampingi 15 orang fasilitator yang merupakan perwakilan dari lembaga akademisi, NGO/CSO, dan staf OPD yang ada di Sintang. Para fasilitator dilatih selama 2 hari oleh tim CSF/YSKI tentang bagaimana proses perencanaan skenario berlangsung dan bagaimana memfasilitasi kegiatan tersebut. Perencanaan skenario .

Di dalam perencanaan skenario, perwakilan dari para pemangku kepentingan memilih satu fokus kepedulian di masa depan yang dirangkum dari diskusi tentang harapan dan kekhawatiran, lalu mengidentifikasi dan

mendiskusikan faktor dan aktor yang mempengaruhi arah perjalanan fokus kepedulian tersebut ke waktu tertentu di masa depan. Pemangku kepentingan kemudian menentukan kemungkinan-kemungkinan gambaran situasi masa depan tentang fokus kepedulian tersebut berdasarkan pemahaman mereka tentang dinamika interaksi antar sesama dan lintas faktor dan aktor. Dengan dasar mencapai pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan utamanya, perencanaan skenario didesain dengan membangun pengetahuan bersama dan pemahaman di antara para pemangku kepentingan tentang faktor-faktor dan aktor dan dampak dari interaksi mereka untuk masa depan pembangunan di Sintang.

Pada tahap selanjutnya dari perencanaan skenario, platform berfungsi sebagai forum di mana para pemangku



kepentingan membahas pilihan pembangunan, memahami *trade-off* (pilihan-pilihan dan konsekuensinya) antara pilihan tersebut, kemungkinan berhasil mewujudkan visi, dan risiko berakhir di masa depan yang mungkin tidak diinginkan.

Perencanaan Skenario telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai visi Sintang Lestari 2030, dan sejumlah rekomendasi kebijakan dan program aksi menuju visi tersebut. Visi bersama ini kemudian diterjemahkan oleh semua pihak, terutama OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang, ke dalam kerangka perencanaan, program kerja yang ada untuk diwujudkan sampai pada aspek penganggaran.

Sebagai tindak lanjut dan untuk mewujudkan pengarusutamaan sekaligus menerjemahkannya ke dalam aspek pemodelan bentang alam (*landscape modelling*), dilakukan **Pelatihan Permodelan Lanskap Berkelanjutan** dari 14 – 18 Januari 2019, kemudian disusul dengan Lokakarya Permodelan Lanskap dari 19 – 22 Februari 2019 di Kabupaten Sintang Sintang.

Peserta pelatihan dan lokakarya terdiri dari 20 orang perwakilan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja di sektor yang terkait dengan perencanaan dan lahan seperti Bappeda, Dinas Penataan Ruang dan

Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga/institusi non-pemerintah lainnya. Tim CSF Indonesia bekerjasama dengan Tim Hatfield Indonesia memfasilitasi proses pelatihan dan lokakarya ini.

Kegiatan selanjutnya adalah lokakarya konsolidasi selama 2 (dua) hari pada 23-24 April 2019 dan dihadiri oleh 60 orang peserta, yang berisi penyampaian hasil permodelan landskap dalam bentuk peta spasial yang menganalisis



perubahan lahan antara kondisi BAU vs Sintang Lestari 2030, serta penjelasan mengenai model dan sub-model yang telah dibangun dan hasil analisisnya.

Para peserta lokakarya dibagi ke dalam beberapa kelompok besar sesuai dengan program utama dari usulan RAD dengan perwakilan terdiri dari OPD, Organisasi Masyarakat Sipil, NGO, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Para stakeholder kemudian menanggapi perubahan lanskap yang terjadi dari permodelan tersebut. Selanjutnya, program-program utama menuju Sintang Lestari disampaikan sebagai usulan RAD dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, 2021 dan RPJMD 2022 – 2027. Para pemangku kepentingan menanggapi usulan program-program utama ini, strategi implementasi, institusi pelaksana dan penganggaran.

Pada Oktober 2019, Visi Sintang Lestari 2030 diformalkan dalam bentuk Peraturan Bupati No. 66/2019 tentang Rencana Aksi Daerah – Sintang Lestari (RAD –SL). RAD-SL ini menjadi panduan implementasi Visi Sintang Lestari ke dalam proses pembangunan multi sektor dan mengakomodasi kolaborasi peran berbagai pemangku kepentingan dengan pemerintah. RAD-SL ini berisikan Narasi Visi, Indikator Kunci, Peta Jalan, dan Kebijakan-kebijakan kunci perubahan dan program prioritas menuju Sintang Lestari 2030.

SINTANG LESTARI 2030

Terwujudnya Masyarakat Sintang
yang Sejahtera, Inovatif, Religius,
Harmonis dan Bermartabat.

Didukung oleh Lingkungan, Sumber Daya Alam
yang Lestari, Stabilitas Keamanan dan
Infrastruktur yang Merata dan Memadai.



RAD-SL berperan dalam mengarahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke arah yang lebih realistik dalam mencapai Visi Sintang Lestari. RAD-SL mensyaratkan perlunya keselarasan antara program pembangunan sektoral dengan kebijakan lanskap dan tata ruang, serta perencanaan investasi. RAD dipahami sebagai mekanisme interim antar waktu perumusan RPJMD untuk menyesuaikan arah perencanaan menuju terwujudnya Visi Sintang Lestari.

CSF/YSKI terus melakukan pendampingan dengan memberikan masukan terhadap proses perencanaan kebijakan dan strategi implementasi. Dukungan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tercermin dari hasil studi, lokakarya, dan berbagai forum diskusi formal maupun informal.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan yang diimbangi dengan upaya memelihara kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Inilah yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini, melalui visi “SINTANG LESTARI” dengan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi berkelanjutan.

Visi ini merupakan hasil dari proses multi-pihak yang dimulai di awal 2018, dan kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ada di Sintang, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil.



PENGUATAN KOMITMEN DAN KAPASITAS

Yang dilakukan pada FASE PENGUATAN KOMITMEN dan KAPASITAS

- Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan dan indikator ekonomi makro
- Webinar, lokakarya, pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Analisis diagnostik pertumbuhan
- Pelatihan tentang PDB Hijau dan akuntansi karbon di Sintang
- Fasilitasi dalam merumuskan RUPM Kabupaten Sintang

Dengan fasilitasi dari CSF/YSKI bekerja sama dengan berbagai pihak, para pemangku kepentingan dan dinas-dinas terkait di Kabupaten Sintang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan visi, perencanaan, serta penyusunan peta jalan menuju Sintang Lestari.

Selanjutnya, CSF/YSKI terus memperkuat komitmen dan kapasitas para pemangku kepentingan melalui pendekatan yang lebih terarah. Yaitu dengan berfokus pada dinas perencanaan di setiap sektor pemerintah dan mitra utama mereka dari kelompok non-pemerintah. Termasuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan berkelanjutan ke dalam anggaran pemerintah kabupaten.

Rangkaian kegiatan selama dua tahun yang dimulai pada Oktober 2019 mencakup pelatihan khusus untuk memperkuat kapasitas perencanaan staf pemerintah, terutama di Bappeda, serta kapasitas teknis organisasi masyarakat sipil (CSO), pemimpin masyarakat adat, dan asosiasi bisnis. CSF/YSKI juga memfasilitasi serangkaian studi dan analisis yang memperkuat proses peningkatan kapasitas yang terjadi.

Pada tahap ini, CSF/YSKI kembali mengadakan **Dialog antar Pemangku Kepentingan** guna menampung masukan tambahan terkait Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL).

RAD-SL ditujukan sebagai upaya implementasi Visi Sintang Lestari untuk diintegrasikan ke dalam program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan RPJMD yang proses penyusunan draft teknokratiknya akan dimulai pada periode 2020-2021. Visi Sintang Lestari, lebih dikonkritkan lagi ke dalam Rencana Aksi Daerah melalui Peraturan Bupati No. 66/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL). Rencana aksi ini ditujukan sebagai upaya untuk menghubungkan agar Visi Sintang Lestari benar-benar secara operasional diintegrasikan ke dalam program-program OPD dan RPJMD periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung penyusunan draft teknokratik RPJMD, CSF/YSKI memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas perencanaan pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan dengan memastikan aspek inklusi dan keterwakilan para-pihak, yaitu pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas perencanaan program pembangunan sektoral. Karena konteks dari lokakarya ini, sebagian besar peserta adalah pemerintah kabupaten.

Sesuai mandat peraturan dan perundangan, semua produk perencanaan pembangunan wajib didahului dan atau disertai dengan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**. Maka CSF/YSKI melanjutkan dengan fokus pada aspek ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terintegrasi, perumusan RPJMD berikutnya, revisi RTRW, serta penguatan tata kelola lahan di Sintang.

Untuk itu pada 7-9 Juli 2020 dilaksanakan Lokalatih KLHS bagi para pihak pemangku kepentingan di Sintang yang mencakup unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Kegiatan lokalatih ini diawali dengan Seri Webinar.

Tidak berhenti sampai di situ, rangkaian upaya peningkatan kapasitas lokal dilanjutkan dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Sintang dengan CSF/YSKI untuk mengadakan lokakarya dengan fokus pada penentuan sektor yang masuk ke dalam PDRB Hijau.

Dalam mendukung penyusunan berbagai program dan rencana pembangunan, tidak hanya diperlukan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang komprehensif, tapi juga diperlukan penentuan indikator capaian yang menjadi tolak ukur suatu pembangunan di daerah. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui proses penghitungannya dan bagaimana ini dikaitkan dengan penyusutan modal yang berasal dari penggunaan sumberdaya alam yang selama ini menjadi penopang pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang.

Untuk itu, menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah Kabupaten Sintang untuk meneruskan menyusun indikator pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan PDRB Hijau dan nilai modal sumberdaya alam dan ekosistemnya.

Lokalatih Perhitungan PDRB Hijau diadakan pada bulan November 2020, sekaligus menakar peran Modal Sumberdaya Alam Kabupaten Sintang. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para pihak pemangku kepentingan di Sintang.

Dalam upaya menyempurnakan dokumen RPJMD yang menjadi panduan untuk OPD dalam merencanakan pembangunan selama lima tahun ke depan, CSF/YSKI juga memfasilitasi diadakannya Dialog Publik pada 22 April 2021 lalu untuk menerima saran dan masukan dari para stakeholders, termasuk CSO dan CBO (*Community/Constituent-Based Organization*) yang bekerja di Kabupaten Sintang.

Selain itu, CSF/YSKI juga memfasilitasi diadakannya pertemuan antar tim penulis RPJMD Kabupaten pada 6 Mei 2021, bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura dan Bappeda untuk mendengarkan secara langsung saran dan masukan terhadap perbaikan Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun.

Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, CSF/YSKI kemudian bekerjasama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melaksanakan “Lokakarya Review Draft Final RPJMD Kabupaten Sintang” pada 27 Juli 2021.

Secara khusus lokakarya ini bertujuan memastikan agar revisi RPJMD telah mengadopsi masukan dari para pemangku kepentingan yang telah disampaikan secara tertulis.

Studi Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Penguatan Kapasitas

Dalam mendukung penyusunan berbagai program dan rencana pembangunan tersebut, CSF/YSKI juga menginisiasi dilakukannya beberapa kajian komprehensif dengan didukung oleh data yang valid.

Dua analisis yang dianggap penting dan mendesak untuk dilakukan adalah 1) Analisis Belanja dan Penerimaan Publik (Public Revenue and Expenditure Review); dan 2) Analisis Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Growth Diagnostic).

Analisis Belanja dan Penerimaan Publik Kabupaten Sintang

Analisis ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD oleh pemerintah daerah Sintang, yang mencakup analisis trend dan rasio terhadap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Analisis ini juga menggambarkan kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah pada beberapa sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Analisis Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sintang.

Bertujuan untuk memberikan analisis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan untuk memberikan analisis simulasi sektor apa saja yang dapat dijadikan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Sintang.

Hasil kedua studi ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian diadopsi dalam pembuatan RUPM. Beberapa kesimpulan yang diambil, di antaranya tentang faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Sintang, PDRB hijau dan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi di Sintang.

Kontribusi sektor terhadap perekonomian Kabupaten Sintang mengalami pergeseran selama satu dekade terakhir dan bergantung pada hasil SDA dan lahan sebagai penopang bagi perekonomiannya. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 30 persen pada tahun 2011. Namun, meski menjadi sektor paling dominan, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan paling dalam menjadi 22% pada tahun 2019.

Keterkaitan antara ketergantungan pada hasil SDA dan lahan menyebabkan tingginya tingkat deforestasi di hutan sekunder dikarenakan struktur ekonomi Sintang yang masih mengandalkan sumber daya alam dan lahan yakni sektor pertanian termasuk di dalamnya sektor kehutanan dan perkebunan.

Deforestasi juga terjadi di kawasan semak dan hutan primer, namun demikian deforestasi tingkatnya tidak sebesar di hutan sekunder. Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah tanaman perkebunan, terutama di perkebunan kelapa sawit. Meningkatnya jumlah perkebunan di Sintang hampir sama dengan penurunan jumlah kawasan gundul di hutan sekunder. Artinya, proses perubahan status lahan dari hutan menjadi perkebunan sudah dimulai dengan mengubah hutan sekunder menjadi perkebunan.

Dengan memasukkan komponen deplesi sumber daya air, maka kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 misalnya, kontribusi sektor ini pada PDRB coklat mencapai 21,7 persen (Rp3.189 miliar). Namun setelah memasukkan unsur deplesi air, kontribusi sektor ini terhadap PDRB semi hijau hanya menjadi sebesar 9,9 persen (Rp1.269 miliar).

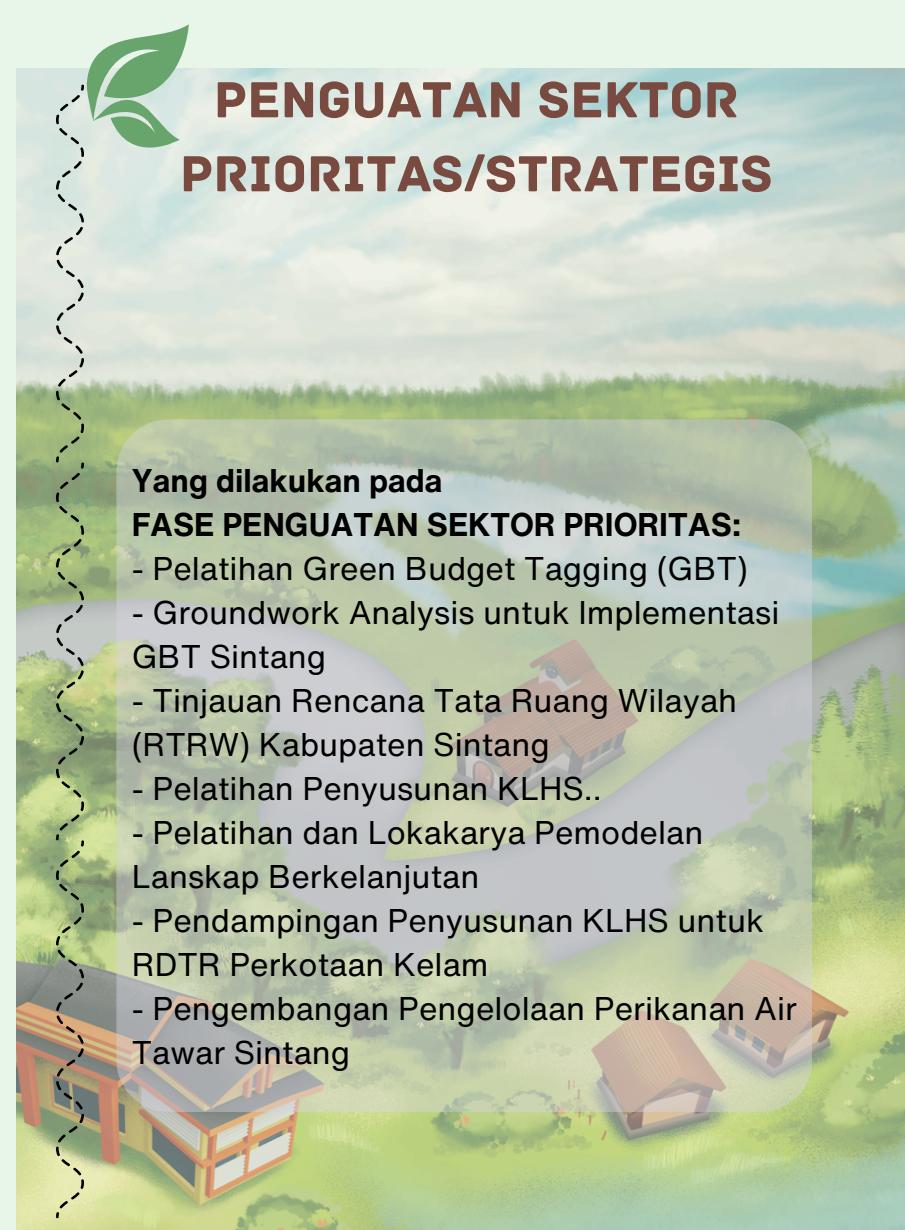


PENGUATAN SEKTOR PRIORITAS/STRATEGIS

Yang dilakukan pada

FASE PENGUATAN SEKTOR PRIORITAS:

- Pelatihan Green Budget Tagging (GBT)
- Groundwork Analysis untuk Implementasi GBT Sintang
- Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang
- Pelatihan Penyusunan KLHS..
- Pelatihan dan Lokakarya Pemodelan Lanskap Berkelanjutan
- Pendampingan Penyusunan KLHS untuk RDTR Perkotaan Kelam
- Pengembangan Pengelolaan Perikanan Air Tawar Sintang



Hasil-hasil kerjasama CSF dengan para mitra pembangunan lain diakui secara luas dan dihargai oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Keterlibatan CSF/YSKI dalam pembentukan Rencana Aksi Daerah - Sintang Lestari, berbagai peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, juga berbagai studi dan analisis pendukung yang dilakukan telah diadopsi ke dalam proses dan agenda perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sintang. Tingkat kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih lanjut melibatkan CSF/YSKI dan CSO dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (melalui permintaan dan konsultasi) juga semakin terlihat.

Selanjutnya CSF/YSKI tetap berkomitmen untuk terus membangun kapasitas pemerintah dan profesional CSO dalam menggunakan analisis ekonomi dan tata kelola yang lebih baik melalui pelatihan dan pendampingan.

CSF/YSKI mendukung penyesuaian rencana tata ruang dengan RPJMD baru dan RUPM baru, pada beberapa arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan dan strategi ini dapat digunakan sebagai masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan strategis yang relevan (Renstra OPD terkait).

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang telah melalui proses Peninjauan Kembali (PK) dan Revisi, berbarengan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-nya. Secara parallel, Kabupaten Sintang juga dalam proses mempersiapkan KLHS untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kelam.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam amanatnya menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus ditinjau kembali dalam periode 5 tahunan. Amanat tersebut juga mensyaratkan Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah bisa dilakukan jika terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala besar; perubahan batas teritorial negara; perubahan batas daerah; atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang pada tahun 2022 lalu sudah mendapatkan rekomendasi melalui Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, perihal Rekomendasi atas Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang mulai dilaksanakan pada tahun 2023, dimulai dengan

pembentukan Tim Teknis dan Tim Ahli, selanjutnya menyusun Materi Teknis serta penyusunan Peta Dasar dan dilanjutkan dengan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Sintang.

Keseluruhan proses tersebut merupakan satu kesatuan kegiatan besar Penyusunan RTRW Kabupaten Sintang yang harus dilakukan secara simultan, dimana proses revisi merupakan pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang yang harus dilaksanakan sesuai pedoman dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021. Pelaksanaan selama 11 bulan sudah termasuk pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RTRW Kabupaten Sintang.

Dalam mendukung operasionalisasi inisiatif diatas, diperlukan penguatan kapasitas untuk para pemangku kepentingan khususnya para perencana program di level OPD Kabupaten Sintang yang erat kaitannya dengan sektor-sektor berbasiskan lahan. Salah satu topik penguatan kapasitas yang diharapkan bermanfaat untuk kebutuhan KLHS dan Revisi RTRW Kabupaten Sintang adalah Analisis Spasial untuk Permodelan Lanskap Berkelanjutan.

Kegiatan pelatihan ini merupakan rangkaian dari kegiatan YSKI/CSF bekerjasama dengan USAID SEGAR dan WWF

Indonesia. Pelatihan ini menghasilkan sebuah rancangan model Perencanaan Lanskap Kabupaten Sintang yang Berkelanjutan dengan beberapa pilihan skenario. Dengan model ini diharapkan visualisasi perbandingan perubahan lahan antara kondisi BAU dapat ditampilkan, dengan kondisi Sintang Lestari berdasarkan hasil perencanaan skenario para pihak.

Program-program yang ada di dalam RPJMD juga memuat arahan investasi yang berkelanjutan (penanaman modal) yang terdapat dalam RUPM Kabupaten Sintang periode 2022 – 2025 melalui Peraturan Bupati Nomor 37 / 2022.

Dalam kaitan itu, diperlukan penggunaan pendekatan *Smart Infrastructure Planning* atau Perencanaan Infrastruktur Cerdas sebagai langkah konkret mengedepankan aspek keberlanjutan dalam perencanaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur baik di sektor energi maupun transportasi merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, karena perannya dalam memberikan efek ganda pada sektor lainnya seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan bangkitnya sektor-sektor lain yang secara keseluruhan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Untuk itu, pembangunan infrastruktur memerlukan perencanaan yang cerdas – memastikan bahwa dampak

positif atas perekonomian dapat dioptimalkan, sekaligus meminimalisir dampak ekologis sedari awal, seperti banjir, longsor, kekeringan, kehilangan biodiversitas dan jasa ekosistem lain yang bila dihitung nilai ekonominya bernilai jutaan dolar.

Perencanaan infrastruktur cerdas memerlukan economic trade-off analysis atau kajian ekonomi yang – pada saat yang sama – dapat meminimalisir risiko kerugian sosial dan lingkungan. Dengan begitu pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan visi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Perspektif ekonomi lingkungan diperlukan untuk memastikan manfaat proyek secara sosial dan lingkungan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, termasuk kerugian yang timbul akibat dampak dari proyek. Inilah salah satu pesan paradigmatis dari perencanaan infrastruktur cerdas yang perlu jadi perhatian utama para pihak, terutama pembuat kebijakan, untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan sosial dan ekologis di kemudian hari.

Pelatihan Perencanaan Infrastruktur Cerdas yang dikembangkan oleh CSF ini diselenggarakan pada bulan Juni 2023, dengan lebih berfokus kepada para pembuat keputusan dan perencana kebijakan baik pada skala

nasional maupun regional. Tujuannya agar para pembuat kebijakan/keputusan pembangunan infrastruktur mampu mempertimbangkan kadar pengorbanan dari pembangunan infrastruktur, sekaligus mampu pula mengidentifikasi opsi solusi untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, CSF/YSKI juga melihat bahwa ada 3 area prioritas yang perlu dikembangkan Sintang dalam jangka pendek hingga menengah, yaitu infrastruktur, sistem pengelolaan perikanan darat berkelanjutan, dan ketahanan pangan. Terdapat juga minat dari pelaku usaha/sektor swasta untuk berinvestasi dan mengembangkan komoditas hijau di Sintang.



Oleh karena itu, CSF/YSKI melanjutkan pendampingan dalam penguatan pengelolaan berkelanjutan sektor sumber daya alam strategis dengan fokus khusus pada perikanan air tawar darat. Prinsip-prinsip Sintang Lestari diadopsi dan diimplementasikan melalui perencanaan tata ruang dan sektoral dengan fokus khusus pada perikanan air tawar darat sebagai pilar utama kedua ketahanan pangan Sintang.

Dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2021 – 2026 yang memuat Visi Sintang Lestari dengan pembangunan ke arah berkelanjutan tidak hanya diperlukan penguatan kapasitas para pihak, namun juga adanya studi/analisis pendukung.

Ada dua studi/analisis pendukung yang dilakukan oleh CSF/YSKI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang dan mitra Pembangunan lain.

Studi Pendukung: Green Budget Tagging (Penandaan Anggaran Hijau)

Green Budget Tagging (GBT) adalah cara untuk mengidentifikasi anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan menuju keberlanjutan sesuai Visi Sintang Lestari. Kajian ini bertujuan mengevaluasi kontribusi anggaran PemKab Sintang dan sumber non-APBD terhadap pembangunan hijau untuk tahun anggaran 2021 dan semester pertama 2022. Upaya ini juga merupakan salah satu cara mencapai nilai baik pada Indeks Kualitas Lingkungan dalam Indeks Kinerja Utama Kabupaten Sintang.

Proses penandaan ini menggunakan ukuran kualitas lingkungan disandingkan dengan dukungan ketersediaan anggaran yang ada, dan dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Juli - Desember 2022. Serangkaian kegiatan pendukung studi ini dilakukan, yaitu Lokakarya Identifikasi dan Pengumpulan Data Awal untuk kebutuhan kajian GBT, dilanjutkan dengan Lokakarya Penulisan, yang berisi materi pengantar tentang konsep, teori dan teknik penulisan laporan studi GBT, policy brief dan infografis. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisis, lalu penulisan hasil ke dalam laporan teknis studi. Yang kemudian ditulis ke dalam policy brief.

Hasil studi yang dilakukan kepada 16 OPD itu menunjukan bahwa pada tahun 2021, anggaran yang tersedia bagi pembangunan hijau di Kabupaten Sintang sebesar Rp 509,9 miliar, dan terealisasi sebesar 87,18%nya, yaitu Rp 444,5 miliar. Dari realisasi anggaran tersebut, yang termasuk dalam penganggaran pembangunan hijau sebesar Rp 397,9 miliar (89,51%)

Sedangkan hingga akhir semester 1 tahun 2022, anggaran yang tersedia bagi pembangunan hijau di Kabupaten Sintang turun menjadi Rp 356 miliar. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan dana transfer dari pusat ke daerah Kabupaten Sintang untuk tahun anggaran 2022. Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 34,9 miliar (9,80%), dan yang termasuk dalam penganggaran pembangunan hijau sebesar Rp 20,9 miliar (59,86%).

Peran mitra pembangunan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan hijau juga disorot dalam studi ini.

Para mitra pembangunan yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil (OMS/NGO) dan korporasi (sektor swasta) memberikan kontribusi melalui porsi anggaran non-APBD. Tahun 2021 kontribusi anggaran non-APBD dari sektor korporasi berjumlah Rp 21 miliar, berasal dari laporan penggunaan dana CSR (Corporate Social

Responsibility) dari 48 perusahaan baik BUMN, BUMD, lembaga keuangan dan perusahaan perkebunan.

Sedangkan besaran kontribusi yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, yaitu dari 17 CSO yang ada di Kabupaten Sintang, pada tahun 2021 berjumlah Rp 18 miliar dan tahun 2022 berjumlah Rp 14,1 miliar.



Scan QR code
untuk laporan
lengkap

Studi Pendukung: Pengelolaan Perikanan Danau Jemut

Studi ini dilakukan untuk memastikan salah satu aspek ketahanan pangan yang ada di Sintang, yaitu perikanan darat dapat dikelola dengan baik agar bisa berkontribusi secara berkelanjutan.

Kabupaten Sintang memiliki potensi produksi perikanan perairan darat yang besar sebagai salah satu sumber protein untuk masyarakat. Namun, tren produksi perikanan yang menurun dan menghilangnya sebagian jenis ikan-ikan konsumsi bernilai tinggi, menunjukkan perlu adanya intervensi pengelolaan yang lebih memadai.

Sektor perikanan darat di Kabupaten Sintang merupakan komoditas yang penting karena berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein. Beberapa makanan khas juga terbuat dari ikan.

Ketahanan pangan yang rendah dapat menyebabkan malnutrisi, salah satunya terlihat dari kasus stunting balita yang tinggi. Meskipun Kabupaten Sintang telah berhasil menurunkan kasus stunting, tetapi prevalensinya masih cukup tinggi, yaitu 28% pada tahun 2021 (Pujianto, 2022).

Untuk menurunkan angka stunting ini, selain diperlukan penyuluhan, juga perlu didukung dengan ketersediaan bahan pangan, terutama protein yang cukup, salah satunya dari ikan.

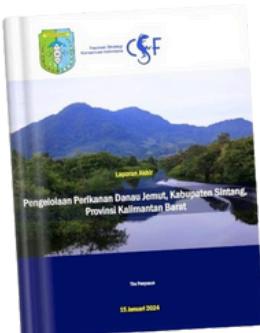
Studi dilakukan di Danau Jemut, yang dipilih berdasarkan diskusi dengan para pemangku kepentingan karena statusnya yang merupakan danau lindung, salah satu bagian dari daerah aliran sungai yang produksi perikanannya melimpah serta pemerintah daerah berniat untuk memajukan desa terdekat sebagai kampung nelayan.

Studi ini mencakup kajian potensi perikanan perairan di Danau Jemut yang menghasilkan usulan rencana pengelolaan yang berkelanjutan serta memberikan rencana tindak strategis yang diperlukan untuk melakukan pengembangan pada daerah tersebut.

Dari hasil studi, setidaknya terdapat 3 aspek penting yang diperlukan untuk pengelolaan ekosistem Danau Jemut yaitu (1) Aspek Ekologi Danau Jemut khususnya terkait dengan pengendalian dan peningkatan kualitas air Danau Jemut; (2) Aspek Sosial-Ekonomi Masyarakat Sekitar Danau Jemut melalui program pengembangan ekonomi lokal berbasis sumberdaya Danau Jemut, baik sumberdaya perikanan maupun non-perikanan; dan (3) Aspek Tata Kelola Danau Jemut.

Hasil studi juga memberikan rekomendasi rencana tindakan strategis pengelolaan perikanan Danau Jemut yaitu melakukan:

- (1) revitalisasi zona konservasi Danau Jemut,*
- (2) pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, dan*
- (3) pengembangan Festival Danau Jemut sebagai ajang promosi wisata.*



Scan QR code
untuk laporan
lengkap



PENGUATAN KOLABORASI PARA PIHAK PEMANGKU KEPENTINGAN



Pemerintah Kabupaten Sintang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan program-program kebijakan, termasuk keterbatasan wewenang, dana, dan sumber daya manusia. Secara internal, mekanisme koordinasi, pengendalian kualitas dokumen-dokumen perencanaan resmi Pemerintah Kabupaten, dan proses tender pembuatan perencanaan masih memiliki peluang perbaikan.

Beragam tantangan ini sering kali menghambat efektivitas dan keberlanjutan dari inisiatif yang diupayakan, sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasinya. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kabupaten Sintang membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemitraan dengan berbagai mitra pembangunan, seperti CSF/YSKI, menjadi solusi strategis yang membantu menghadapi keterbatasan tersebut. Kerjasama ini telah menunjukkan hasil positif dalam memperkuat kemampuan pemerintah daerah mengelola tantangan, dengan memaksimalkan dukungan sumber daya dan keahlian dari para mitra pembangunan.

Dalam menjalankan program-programnya di Kabupaten Sintang, CSF/YSKI aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lokal. Tidak hanya dengan Organisasi Perangkat Daerah, namun juga melibatkan sejumlah mitra pembangunan penting, seperti LTKL,

AMAN, FKMS, WWF Indonesia, dan Rainforest Alliance.

Dengan membangun jejaring multipihak, CSF/YSKI mampu mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam memetakan kondisi terkini yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Kolaborasi juga mempermudah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan bagi kebijakan pembangunan daerah.

Para mitra berbagi peran dan keahlian masing-masing. WWF Indonesia dalam satu kesempatan berbagi mengenai kontribusi CSF/YSKI di Sintang dengan expertisnya pada sisi analisis dan strategis, melengkapi kerja para mitra pembangunan lain di Sintang. Termasuk memfasilitasi proses disahkannya Peraturan Bupati Tahun 2021 tentang RAD-SL Pendapat senada juga diungkapkan oleh Rainforest Alliance, yang mengakui CSF/YSKI memiliki kelebihan dalam hal penyusunan dokumen yang sangat detail dan berisi, yang sangat membantu Rainforest Alliance untuk mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan yang memperkaya program-programnya.

Tidak hanya dengan CSO/NGOs, Pemerintah Kabupaten Sintang juga membuka kesempatan kerjasama dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social*

Responsibility (CSR). CSR di Sintang tidak lagi bersifat musiman, melainkan diarahkan pada kontribusi jangka panjang yang lebih terfokus pada sektor strategis seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Pemerintah juga menyesuaikan peraturan agar CSR dapat berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai hasilnya, semakin banyak perusahaan yang berlomba-lomba memberikan kontribusi nyata melalui berbagai program yang terencana dengan baik.

Pemerintah Sintang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menjalankan program CSR-nya sendiri dengan tetap berkoordinasi sesuai tujuan yang telah dipetakan, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesehatan masyarakat. Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan program CSR juga diakui dengan pemberian sertifikat penghargaan melalui program CSR Award yang dapat memudahkan proses perizinan dan membangun reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Kolaborasi antara berbagai pihak ini diharapkan akan terus mendorong inovasi kebijakan berkelanjutan yang berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sintang, termasuk dalam menarik investor dan mengembangkan program-program berbasis penelitian.



Refleksi Akhir



Kolaborasi dan Perubahan Pola Pikir:
Kunci Menuju Sintang Lestari

Selama 6 tahun perjalanan CSF/YSKI di Kabupaten Sintang, menurut para narasumber penulisan dokumen ini, terjadi transformasi pola pikir para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Sebelumnya, banyak kebijakan dibuat dengan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek sumber daya alam dan lingkungan. Namun, melalui serangkaian pelatihan, dialog, pendampingan, didukung oleh studi-studi yang memadai, para pemangku kepentingan mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk mewujudkan visi bersama Sintang Lestari.



Terlihat pula tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, maupun komunitas lokal dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini terbukti efektif dalam menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan terhadap berbagai perencanaan pembangunan. Setiap kelompok memiliki peran dan kontribusi yang krusial dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya berdampak positif pada jangka pendek, tetapi juga jangka panjang bagi kelestarian alam Sintang dan kepentingan generasi mendatang.



Pencapaian ini tidak lepas dari upaya sistematis dalam melakukan berbagai pendekatan, dialog, peningkatan kapasitas lokal, didukung oleh kesediaan para pemangku kepentingan untuk membuka diri, dan adanya data, analisis, serta rekomendasi kebijakan berbasis ilmu ekonomi dan keuangan, yang membantu membuat kebijakan memahami dampak lingkungan dari setiap kebijakan yang diusulkan.

Adopsi regulasi seperti Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari menjadi bukti bahwa pemerintah Sintang kini lebih siap dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Ini juga menjadi dasar kuat untuk integrasi prinsip-prinsip Sintang Lestari dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Enam tahun perjalanan CSF/YSKI di Sintang juga menegaskan bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan proses yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, perlu terus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dari hasil yang telah dicapai. Ini termasuk memperkuat kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan, tata guna lahan, pengelolaan sumber daya alam, serta tata kelola perekonomian secara umum (*economic governance*).

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan wewenang, keuangan, sampai sumber daya manusia. Namun dengan kerjasama yang solid dan komitmen kuat dari semua pihak, visi Sintang Lestari sedikit demi sedikit dapat diwujudkan.

Tulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan contoh dan gambaran langkah konkret tentang bagaimana integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dapat dilakukan dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak yang sama dalam merawat bumi dan masa depan kita bersama.



Diskusi Warung Kopi

Warung kopi di Kabupaten Sintang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat. Warung kopi bukan hanya tempat untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga menjadi ruang publik di mana berbagai diskusi penting berlangsung. Fungsi Warung Kopi beralih menjadi ruang diskusi informal di mana warga, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan bertemu untuk berbagi gagasan, yang telah menjadi bagian dari identitas lokal dan menjadi wadah untuk membahas isu-isu strategis.

Diskusi di warung kopi di Sintang sering kali lebih efektif memicu ide kreatif dan inovatif. Di warung kopi, batas status dan hierarki antara pejabat dan masyarakat menjadi lebih cair, sehingga dialog yang terjadi lebih mendalam dan partisipatif. Warung kopi telah menjadi tempat di mana ide-ide yang tidak keluar dalam rapat resmi justru muncul dan berkembang.

Salah satu keunikan budaya warung kopi di Sintang adalah perannya dalam merumuskan kebijakan daerah. Banyak kebijakan penting dilahirkan dari hasil diskusi di warung kopi. Pejabat pemerintahan sering memanfaatkan suasana santai ini untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, hingga aktivis. Dalam konteks kebijakan, ini menjadi penting karena pejabat dan tokoh masyarakat

dapat dengan cepat merespons isu-isu yang sedang berkembang, serta mendiskusikan langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

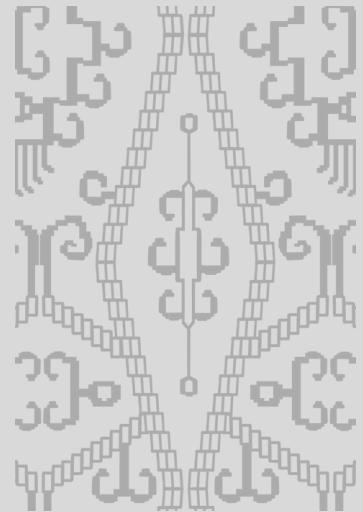
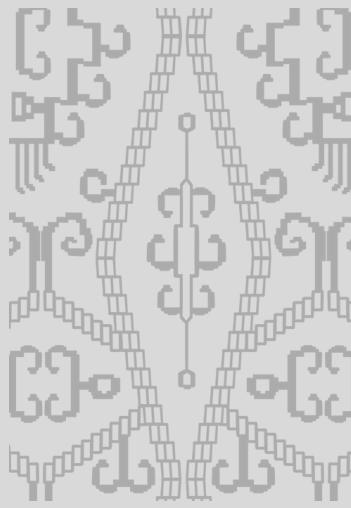
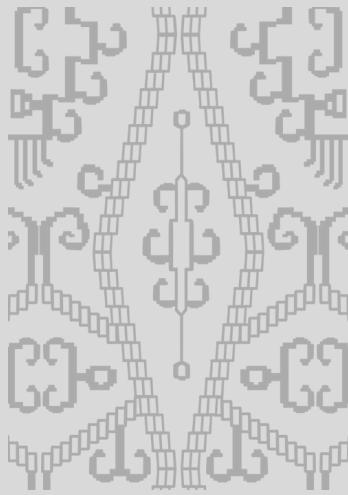
Warung kopi juga membantu membangun jaringan berbagai kelompok masyarakat di Sintang. Tempat ini menjadi titik temu bagi mereka yang memiliki minat yang sama, baik itu dalam bidang bisnis, sosial, atau lingkungan. Hal ini menciptakan sinergi antara berbagai sektor, yang pada akhirnya memperkuat implementasi kebijakan daerah. Selain sebagai ruang diskusi, warung kopi juga berperan dalam memperkuat budaya partisipasi publik di Sintang. Di banyak kesempatan, warga bisa langsung memberikan pendapatnya mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi daerah. Hal ini memperkuat semangat demokrasi di Sintang, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain manfaat sosialnya, warung kopi di Sintang juga berkontribusi pada perekonomian lokal, terutama dengan meningkatnya minat terhadap kopi lokal Kalimantan Barat. Kopi robusta dan liberika yang tumbuh di daerah ini mulai diminati dan menciptakan peluang ekonomi bagi petani lokal. Dengan demikian, warung kopi juga turut mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi, terutama dalam rantai pasok kopi yang melibatkan produksi, distribusi, hingga konsumsi di tingkat lokal dan nasional.



TERIMAKASIH KEPADA

- The David and Lucile Packard Foundation
- BAPPEDA Kabupaten Sintang
- Sekretaris Daerah Sintang
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lingkar Temu Kabupaten Lestari
- Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Sintang
- Sekretariat Bersama Sintang Lestari
- WWF Indonesia
- AMAN
- Rainforest Alliance
- Keling Kumang
- Tim Ahli Universitas Kapuas
- Tim Ahli FPIK - IPB University
- Tim Ahli Universitas Tanjungpura
- Tim Groundwork Analysis 1 "Green Budget Tagging"
- Tim Groundwork Analysis 2 "Inland Fisheries dan Ekowisata"





Conservation Strategy Fund
Yayasan Strategi Konservasi Indonesia
Graha Simatupang
Tower 2, Unit C, 4th Floor
Jl. T.B. Simatupang, Kav. 38
Jakarta Selatan 12540